

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Partisipasi perempuan tidak hanya menuntut hak yang sama, tetapi juga menunjukkan peran penting mereka dalam pembangunan masyarakat. Melihat perempuan sebagai sumber daya manusia, menyertakan perempuan dalam proses pembangunan adalah tindakan yang efektif. Tanpa menyertakan perempuan dalam proses pembangunan berarti pemborosan dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Semua orang baik laki-laki maupun perempuan sebaiknya memiliki kemampuan, keinginan, dan kebutuhan yang sama, sehingga idealnya mereka harus memiliki tingkat kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan keterlibatan politik yang sama. Di sini, secara implisit, tidak diakui adanya perbedaan biologis yang mempengaruhi kemampuan yang dapat dimiliki laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, kemampuan manusia dapat dilihat dalam sifatnya yang spesifik dan universal. Kemampuan universal merupakan kemampuan yang ada pada laki-laki dan perempuan dalam kapasitas dan potensi yang cenderung sama. Oleh karena itu, ide kesetaraan yang seimbang ini sangat mungkin terjadi pada kemampuan universal. Namun, kemampuan khusus adalah kemampuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan karena femininnya, yang mempengaruhi keputusannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik. Karena keragaman biologis ini, kesetaraan yang seimbang tidak tepat karena metode untuk mencapainya berbeda antara laki-laki dan perempuan (Wibowo, 2012).

Berbicara mengenai kesetaraan dan keadilan gender di bidang politik masih sangat rendah khususnya mengenai partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik. Kebijakan yang masih bias gender adalah salah satu penyebab ketidakadilan gender ini. Kadang-kadang, kultur budaya menggambarkan perempuan sebagai makhluk yang lemah, tidak dapat berdebat, tidak logis, dan cepat emosional, yang menghalangi mereka untuk maju dalam politik. Karakter alami ini kadang-kadang tidak dapat diubah dan hanya dapat dikendalikan. Dalam hal politik sangat penting bagi semua warga masyarakat untuk terlibat baik laki-laki maupun perempuan, namun diskriminasi terhadap perempuan menyebabkan keterlibatan perempuan dalam politik diragukan. Kita semua tahu bahwa budaya patriarki yang menempatkan kaum laki-laki

di atas perempuan adalah yang paling banyak dianut oleh masyarakat di seluruh dunia. Perempuan dianggap hanya harus menangani masalah rumah tangga oleh konstruksi sosial budaya tertentu. Tak ada hak untuk memasuki area publik lainnya. Fakta ini menunjukkan bahwa keyakinan itu masih kuat. Fakta bahwa perempuan tidak secara proporsional terlibat dalam kehidupan sehari-hari di ranah publik membuat masalah perwakilan perempuan semakin penting. Budaya ini seringkali menjadi penghalang bagi perempuan untuk maju dan berhasil dalam karir politik. Politik tidak hanya diukur dari berapa banyak perempuan yang memegang jabatan pemerintahan, tetapi juga dari seberapa sering mereka dapat menyuarakan pendapat dan ide mereka dalam menjalankan tanggung jawab (Tridewiyanti, 2012).

Representasi perempuan seringkali dikaitkan dengan masalah-masalah yang mereka hadapi di rumah bersama anak dan suami. Di samping itu, perempuan sering ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbeda dengan pertanyaan yang dilontarkan kepada kaum laki-laki. Dalam proses pengambilan keputusan dan posisi kekuasaan, partisipasi dan keterwakilan perempuan masih belum terefleksikan dengan baik. Oleh karena itu, representasi perempuan dalam politik masih bisa dikatakan sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Perempuan hanyalah dianggap sebagai objek pembangunan dan belum di benarkan sebagai pelaku pembangunan. Maka, diperlukan adanya peningkatan organisasi dan pemantapan pilar-pilar demokrasi untuk pembangunan pendidikan politik perempuan. Hal Ini harus dicapai melalui lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang aktif dan mendukung kepentingan perempuan. Kondisi seperti ini perlu menjadi sorotan bagi pemerintah, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah memperkuat masalah Pendidikan bagi kaum perempuan. Dengan meningkatnya kesadaran politik di kalangan perempuan, diharapkan agar mereka dapat memanfaatkan peluang dan kesempatan dengan cara yang sesuai dengan potensi mereka dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sucitawathi, n.d.).

Di Turki sendiri, diskriminasi terhadap perempuan masih sangat tinggi. Sebenarnya, ada beberapa peraturan di Turki yang melindungi hak-hak perempuan, seperti melarang memberikan hak untuk perceraian dan pemilihan yang sama. Di tahun 1990an, hak perempuan menjadi prioritas utama di seluruh dunia, sehingga perlindungan hak perempuan ini diperkuat di tingkat global. Hak perempuan harus dipertimbangkan seiring dengan hak asasi manusia. Pada masa itu, perempuan mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang lebih tinggi. Ketika para perempuan di Turki menempati tempat yang adil dan bergengsi sama dengan laki-laki dan bekerja

sama dengan laki-laki dalam tugas-tugas yang rumit dan sulit di negara mereka, mereka membuktikan bahwa perempuan juga bisa melakukan apa yang dilakukan laki-laki jika mereka diberi kesempatan yang sama dan adil. Setelah itu, gerakan pro perempuan pertama muncul pada tahun 1930an, sebagian besar didukung oleh Persatuan Wanita Turki (Jamayanti, 2021).

Namun, hal itu tidak berlangsung lama setelah berada di bawah pemerintahan presiden Turki yang baru yaitu presiden Erdogan. Semenjak Erdogan dinaikkan sebagai Frontman AKP, perempuan di kesampingkan ke dalam peran yang perifer. AKP mempertahankan tradisi dan keluarga, dan setelah pemilihan umum 2011, AKP mengubah Kementrian Wanita menjadi Kementerian Keluarga dan Sosial Politik. Erdogan terlihat menggunakan perempuan sebagai alat untuk menciptakan batas-batas budaya dan sejarah yang memisahkan Turki dari negara lain. Tujuan agenda mereka adalah untuk mengembalikan peran tradisional perempuan sebagai istri dan ibu. Organisasi hak perempuan yang bekerja untuk mendorong partisipasi perempuan dalam masyarakat menanggapi hal ini dengan negatif. Amandemen Kode Sipil Turki telah dikritik karena tidak mencapai tujuan yang diharapkan untuk memperluas kesetaraan gender. Karena Turki mengalami penurunan dalam Indeks Kesenjangan Gender Global, hal ini pun banyak mendapat kritikan (Jamayanti, 2021).

Pencapaian kesetaraan gender terutama dalam hal partisipasi politik dan kepemimpinan perempuan di Turki, sangat perlu menjadi prioritas utama. Pada dasarnya, perempuan Turki juga berkontribusi dalam kehidupan masyarakat sama dengan kaum laki-laki karena mereka menjalankan dua peran yaitu dalam ekonomi sebagai pelaku produksi dan dalam keluarga sebagai pelaku reproduksi. Namun, partisipasi perempuan dalam semua aspek sistem politik dan proses masih kurang atau tidak setara dengan kaum laki-laki. Menurut laporan *International Parliament Union* (IPU) tahun 2019, pada tahun 2018 Turki memiliki 596 bangku di majelis rendah maupun di majelis tunggal namun jumlah perempuan di dalamnya hanya sebanyak 104 atau sekitar 17,4%. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di Turki, termasuk proposal amandemen untuk mengupayakan perempuan berada pada posisi terpilih. Namun masih terdapat beberapa kendala utama seperti hambatan struktural, institusional, dan budaya. Fakta struktural yang terjadi pada politik di Turki merupakan dominasi kaum laki-laki dalam proses pengambilan keputusan dan juga kurangnya representasi perempuan didalamnya. Dibandingkan dengan negara lain, Turki masih memiliki partisipasi politik dan keterwakilan

perempuan yang lebih rendah dalam badan-badan terpilih di tingkat nasional maupun lokal (Kızılırmak et al., 2022; Putra & Ivan Yudha Firmansyah, 2018).

Table 1.1. Partisipasi Politik Perempuan di Turki Tahun 2016.

Indikator	Perempuan	Laki-Laki	Rasio perempuan terhadap laki-laki	Peringkat
Posisi Perempuan di Parlemen	15%	85%	18%	100
Posisi Perempuan dalam Kementrian	4%	96%	4%	137
Posisi Kepala Negara Perempuan dalam 50 Tahun Terakhir	3%	47%	6%	68

Sumber: *The Global Gender Gap Report 2016*.

Menurut *World Economic Forum's Global Gender Gap Report* tahun 2016, Turki berada di peringkat ke – 113 dengan skor 0,090 dari 144 negara dalam pemberdayaan politik perempuan. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, Turki mengalami kesenjangan gender dalam pemberdayaan perempuan di bidang politik. Posisi perempuan di parlemen hanya 15%, posisi perempuan dalam kementrian hanya 4% dan posisi kepala negara perempuan dalam 50 tahun terakhir hanya 3%. Hal ini menunjukkan bahwa di tahun 2016 Turki masih berada pada skor yang tidak terlalu tinggi dalam hal partisipasi politik perempuan. Memang skor partisipasi politik perempuan di Turki ini seringkali naik ataupun turun. Namun, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sudah terlihat ada sedikit kemajuan di negara tersebut. Walaupun perempuan Turki memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai pegawai dalam administrasi publik pemerintah sejak tahun 1934, mereka masih menghadapi kesulitan untuk masuk ke proses pengambilan keputusan dan representasi politik karena kelompok perempuan yang lebih rendah.

Tabel 1.2. Partisipasi Politik Perempuan di Turki Tahun 2017.

Indikator	Perempuan	Laki-Laki	Rasio perempuan terhadap laki-laki	Peringkat
Posisi Perempuan di Parlemen	14,6%	85,4%	17%	108
Posisi Perempuan dalam Kementrian	3,8%	96,2%	4%	135
Posisi Kepala Negara Perempuan dalam 50 Tahun Terakhir	2,7%	47,3%	6%	38

Sumber: *The Global Gender Gap Report 2017*.

Pada tahun 2017 Turki mengalami sedikit penurunan, yaitu berada pada peringkat 118 dengan skor 0,088 di bidang pemberdayaan politik perempuan dan peringkat ke – 131 dalam *global index*. Pada tahun 2017 mengalami penurunan peringkat pada posisi perempuan di parlemen dengan angka 14,6%, dan mengalami kenaikan peringkat pada posisi perempuan di kementrian dan posisi perempuan sebagai kepala negara dalam 50 tahun terakhir, namun angkanya mengalami penurunan yaitu menjadi 3,8% dan 2,7%. Hal ini terjadi karena masih banyak kelompok perempuan yang belum berpartisipasi dalam kepentingan politik dan pembangunan.

Masih terbilang tidak mudah untuk negara Turki mewujudkan pencapaian kesetaraan gender dalam hal partisipasi politik perempuan yang sesuai dengan rata-rata global, karena pemimpin Turki yang masih percaya pada ideologi patriarki dan konsep maskulinitas, yang memandang rendah kaum perempuan dalam tatanan sosial. Bukan hanya pemimpin Turki saja yang percaya dengan ideologi ini tetapi negara Turki juga terkenal dengan sebagian besar masyarakatnya yang cenderung menganut ideologi patriarki, meskipun telah mengalami proses modernisasi namun, sistem patriarki ini masih terdapat di negara tersebut. Di negara Turki, tidak ada satupun undang-undang yang mengatur mengenai representasi politik atau proses pengambilan keputusan politik yang mendefinisikan realisasi kesetaraan gender. Fakta struktural politik di Turki menunjukkan dominasi laki-laki dan kekurangan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Perempuan yang bergabung dengan partai politik membantu

mobilisasi pemilih perempuan, tetapi mereka tidak membantu dan melatih perempuan untuk meningkatkan perwakilan kaumnya di bidang politik. Karena itu, hanya segelintir perempuan kelas atas yang memiliki kekuasaan yang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Untuk meningkatkan partisipasi politik kaum perempuan, masalah struktural dan budaya yang menghalangi pemberdayaan perempuan harus dievaluasi (Putra & Ivan Yudha Firmansyah, 2018).

Untuk membantu pemerintah Turki dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik membutuhkan bantuan *UN Women* yang merupakan organisasi PBB yang berkomitmen untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Organisasi ini bekerja untuk memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan memiliki akses yang sama ke pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik, serta untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Organisasi ini juga mempromosikan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender di institusi legislatif. Dalam mendorong partisipasi politik perempuan di Turki, tentu memerlukan bantuan dan organisasi internasional tersebut. *UN Women* Turki mulai beroperasi sejak tahun 2012, untuk mendukung pemerintah dalam memenuhi komitmen Turki terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. *UN Women* Turki mendukung undang-undang, program, dan anggaran yang responsif gender serta membangun jaringan, kemampuan, dan diskusi antara para pemimpin perempuan dalam jabatan terpilih, sektor publik dan swasta, serta masyarakat sipil (UN Women, 2021).

Selain keterlibatan dari *UN Women* juga ada kontribusi dari Pemerintah Swedia yang mendukung *UN Women* dalam menjalankan program *Gender Equality in Political Leadership and Political Participation in Turkey* yang sudah di implementasikan dari tahun 2014 – 2020, juga ada keterlibatan dari pemerintah Swedia yaitu melalui *Swedish International Development Agency (SIDA)* yang merupakan lembaga pemerintah khusus yang menangani kebijakan bantuan pembangunan internasional dan kepentingan Swedia dalam kebijakan luar negeri yang didirikan pada tahun 1995 melalui undang-undang khusus yang diberikan oleh pemerintah dan juga berfokus pada upaya mengurangi kemiskinan dan penindasan di seluruh dunia, serta mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan demokratis. Swedia telah lama menjalin hubungan kemitraan dengan Turki dan membantu upaya *UN Women* untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di negara tersebut termasuk mendanai program tersebut (Sergeev, 2021).

Program *Gender Equality in Political Leadership and Political Participation in Turkey* ini bekerja untuk memastikan hal-hal seperti; hukum dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan telah diadopsi dan diimplementasikan; proses yang responsif gender (mekanisme, prosedur, dan layanan parlementer) mendorong perempuan untuk menjadi pemimpin dan berpartisipasi dalam politik; pendukung kesetaraan gender memengaruhi kebijakan dan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dan kepemimpinan perempuan. Dalam proyek ini, perempuan di dewan nasional dan lokal terlibat dalam pengembangan kapasitas dan pelatihan, serta advokasi dan pelatihan terutama dengan pendukung kesetaraan gender. Inisiatif dengan adanya kontribusi dari program ini sangat penting mengingat perempuan di Turki masih kurang dari rata-rata dunia dalam partisipasi dan representasi politik. Meskipun partai politik telah menggunakan kuota dan tindakan sukarela lainnya untuk meningkatkan representasi perempuan, proyek ini bertujuan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses peran kepemimpinan dan berpartisipasi dalam politik di semua tingkatan. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan gambaran perempuan yang tidak stereotipikal dan meningkatkan kemampuan perempuan untuk memegang peran pengambilan keputusan, terutama di tingkat lokal (Akgül et al., 2020).

Melalui program, *Gender Equality in Political Leadership and Political Participation in Turkey* yang diselenggarakan oleh *UN Women UN* dan didanai oleh SIDA bermaksud untuk menyoroti keterlibatan perempuan dalam politik dan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, membentuk kader perempuan yang beragam yang dapat mencalonkan diri sebagai pejabat politik lokal, meningkatkan solidaritas dan kesadaran akan kesetaraan gender di antara perempuan dari berbagai afiliasi politik, memperkuat kerangka hukum dan kebijakan nasional, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang mempertimbangkan gender di tingkat lokal. Kolaborasi antara *UN Women* dan Pemerintah Swedia menunjukkan komitmen untuk memajukan kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan di bidang politik, dan menggarisbawahi pentingnya upaya berkelanjutan untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi perempuan di Turki ketika mereka berpartisipasi dalam politik dan mengakses peran kepemimpinan (UN Women, 2021).

Topik dari penelitian ini penting untuk diteliti salah satunya karena keadaan Turki yang masih memegang ideologi patriarki, yang mana harus dihilangkan untuk mendapatkan hak-hak perempuan dalam partisipasi politik. Alasan-alasan lainnya

yaitu, rendahnya presentasi anggota parlemen perempuan di Majelis Nasional Agung Turki, dan partisipasi perempuan dalam politik dan perwakilan lokal dan nasional Turki masih di bawah rata-rata dunia. Selain itu untuk mengatasi hambatan-hambatan yang bersifat struktural, institusional, dan kultural, termasuk peran gender dan pembagian kerja berdasarkan gender. Partisipasi politik perempuan merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan representasi politik yang adil dan juga dalam proses pengambilan keputusan, melalui penelitian ini menjelaskan bagaimana inisiatif dan program yang didukung oleh *UN Women* dan pemerintah Swedia dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan di Turki.

Oleh karena itu, *UN Women* mencoba untuk mengkontribusikan program ini dengan tujuan untuk mengubah pandangan masyarakat Turki dan juga masyarakat diseluruh dunia tentang perempuan yang tidak bisa dilibatkan dalam urusan-urusan politik. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk memahami inisiatif, tantangan, dan konsekuensi dari upaya tersebut dalam meningkatkan kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan di bidang politik. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kerja sama antara pemerintah negara dan organisasi internasional dalam mempromosikan kesetaraan gender dan dapat menjadi pelajaran berharga bagi negara dan organisasi lain yang berusaha mencapai tujuan serupa.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang rumusan masalah yang akan di ambil adalah **“Bagaimana upaya *UN Women* dan pemerintah Swedia melalui program *Gender Equality in Political Leadership and Political Participation in Turkey* dalam mendorong partisipasi politik perempuan di Turki?”**

1.3. Pembatasan Masalah

Setelah masalah yang ditemukan dalam penelitian ini diidentifikasi, diputuskan bahwa diperlukan adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah merupakan batasan penelitian atau ruang lingkup penelitian yang ditetapkan pada awal penelitian dan pada saat sebelum pengumpulan data dimulai. Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka penelitian ini membataskan ruang lingkup penelitian yang menitik beratkan pada upaya Pemerintah Swedia Melalui *UN Women* Dalam Mendorong Partisipasi Politik Perempuan di Turki tahun 2018 –

2020. Karena pada tahun ini partisipasi politik perempuan di turki masih terbilang cukup rendah oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dari *UN Women* dan pemerintah Swedia untuk merealisasikannya.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi partisipasi politik.
2. Untuk mengetahui peran *UN Women* dan pemerintah Swedia dalam mendorong partisipasi perempuan dalam politik.
3. Untuk mengetahui implementasi program *Gender Equality in Political Leadership and Political Participation in Turkey*.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

1. Untuk mengembangkan pengetahuan tentang isu gender dalam HI.
2. Memberikan pemahaman tentang bagaimana persoalan ketimpangan partisipasi politik perempuan di turki.
3. Membantu dalam mengembangkan teori penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana upaya *UN Women* dan pemerintah Swedia mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam politik di Turki melalui program *Gender Equality in Political Leadership and Political Participation in Turkey*.
4. Memberikan kerangka kerja untuk penelitian tambahan mengenai upaya pemerintah Swedia dan *UN Women* dalam mendorong partisipasi politik perempuan di Turki.

2. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Turki, mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

perempuan dan bagaimana UN Women dan Pemerintah Swedia dapat bekerja sama untuk meningkatkan partisipasi ini.

2. Penelitian ini dapat membantu dalam membangun program khusus untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Turki, seperti pelatihan, pendidikan, dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan dalam politik.
3. Penelitian ini dapat membantu dalam pembuatan kebijakan yang lebih efisien yang meningkatkan partisipasi politik perempuan di Turki dengan mempertimbangkan bagaimana kebijakan ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan dalam politik.

3. Kegunaan Akademis

1. Penelitian ini berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat Turki tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam politik serta bagaimana United Nations Women dan pemerintah Swedia dapat membantu meningkatkan kesadaran ini.
2. Dapat membantu peneliti baru dalam pengembangan sistem informasi, mendukung kemajuan ilmu pengetahuan.
3. Peneliti dapat menggunakan pengetahuan teoritis mereka di lapangan untuk memperluas pengetahuan mereka.